

DISERTASI

**POLITIK BAHASA NASIONAL DAN DAERAH
DALAM PERSPEKTIF ORANG LAMAHOLOT
MENJADI ORANG INDONESIA**

Sebastianus Fernandez, disertasi yang dipertahankan untuk memperoleh gelar doktor Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, pada 23 Maret 2009

ABSTRACT

This article constitutes a summary of a dissertation entitled National and Regional Language Politics in the Perspective of Lamaholot People of Becoming Indonesian. The purpose of the research was to reveal and describe the impact of Indonesian national language politics on the nationality and the ethnic sentiment of the native speakers of Lamaholot. The method employed in the research is qualitative in its nature. This study results in some findings, among others, are: (i) the Indonesia language politics is successful in promoting Indonesian language as the language of unity among Indonesian people and, at the same time, it is successful in building Indonesian linguistic nationalism among West Lamaholot language communities, (ii) the language policy aiming at linguistic homogeneity within Indonesian multi-ethnic societies cannot get rid of Lamaholot language and its ethnic sentiment; (iii) the communities are resistant to the policy which promotes some asymmetric, feudal and non-egalitarian state language; (iv) the older generation are resistant to the use of Indonesian language in cultural and traditional domains; and (v) the communities can wisely distinguish between the use of Indonesian language and the use of Lamaholot in its appropriate domain. This study brings about some theoretical understandings related to the concepts of nationality, ethnicity and language policy in a modern nation-state. Firstly, it reveals that the language policy has failed to make the use of minority languages come to an end. Secondly, to promote a language of unity among the societies in a multi-ethno-linguistic sphere is of paramount importance. But, this does not signify that the national language can replace all functions of the other minority

languages. Finally, ethnicity and nationality in multi-ethnic societies within a modern nation-state do not always become two conflicting and contradicting entities. Ethnicity and nationality may coexist peacefully if they are properly managed.

Keywords: Language Politics, assimilationist language policy, ethnicity, nationality, nation-state, linguistic homogeneity

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengakuan terhadap bahasa, baik sebagai suatu hak, sumber daya, suatu masalah (Ruiz 1984) maupun sebagai salah satu unsur yang menerangkan dan mengelompokkan suatu bangsa atau (etnik) seseorang, bukanlah merupakan hal yang baru. Setidak-tidaknya, sejak nasionalisme kultural yang dicanangkan oleh Johann Gottfried Herder pada abad XVII, bahasa sudah dipahami sebagai sebuah pintu masuk ke suatu pemahaman diri kolektif suatu kelompok (Herder 1772 dalam Lee 2001: 15; Edwards 1985: 23-27; Smith 1986: 109-110 dalam Johnson 2001; Sole 1995 dalam Schmidt 2000: 6;).

May (2001: 1-4) berpendapat bahwa ada dua kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang hidup matinya suatu bahasa. *Pertama*, paham Darwinisme linguistik sosial (*linguistic social Darwinism*) yang berpendapat bahwa bahasa itu hidup, dipelihara, berkembang dan bahkan punah atau mati secara alamiah. Kepunahan bahasa merupakan suatu kegagalan bahasa itu sendiri atau kegagalan penuturnya dalam berkompetisi menghadapi belantara di dunia modern. *Kedua*, bahwa pandangan Darwinisme yang menggunakan metafora biologis itu menutup dan mengaburkan peran faktor sosial dan politis yang lebih luas terhadap kepunahan bahasa. Kepunahan bahasa, menurut pandangan yang kedua ini, bukan persoalan atau isu bahasa yang utama karena masih banyak persoalan yang berhubungan dengan kekuasaan (*power*), prasangka (*prejudice*), kompetisi yang tidak seimbang (*unequal competition*) dan, dalam banyak kasus, diskriminasi dan subordinasi yang nyata-nyata ada (*overt discrimination and subordination*). Pandangan ini didukung juga oleh Chomsky (1979: 191) yang mengatakan bahwa persoalan bahasa pada dasarnya adalah persoalan kekuasaan.

Banyak pakar sependapat bahwa bahasa merupakan unsur yang esensial dalam nasionalisme modern karena pada kenyataannya bahasa merupakan alat yang ampuh (*powerful instrument*) untuk mempromosi kohesi internal dan menyajikan identitas etnik atau nasional. Bahasa memberi kontribusi kepada nilai, identitas, rasa kebangsaan (*peoplehood*) dan merupakan sekat-sekat yang efektif antara orang kita (*in-groups*) dan lian (*out-groups*). Dalam pengertian seperti ini, pada dasarnya bahasa berhubungan dengan kekuasaan (Schmid 2001: 9; Anderson 1991; Chomsky 1979; Smith 1971).

May (2001: 5-7) yang menghubungkan negara-bangsa dengan bahasa mengatakan bahwa bahasa menjadi suatu hal yang unik karena merupakan fenomena historis. Itu baru dan merupakan produk nasionalisme beberapa abad yang lalu, khususnya diawali dengan Revolusi Perancis. Nasionalisme ala Perancis itu menekankan pada homogenitas budaya dan bahasa yang diartikan dalam pengertian tentang "negara-bangsa yang sama dan sebangun" (*nation-state congruence*).

Negara-bangsa yang sama dan sebangun ini berpendirian bahwa batasan identitas politik dan nasional harus bertepatan atau serupa (*the boundaries of political and national identity should coincide*). Dalam pandangan ini diyakini bahwa idealnya orang-orang (*people*) atau bangsa yang merupakan warga negara (*citizens*) dari suatu negara tertentu (*a particular state*) seharusnya juga adalah anggota suatu kolektivitas nasional yang sama. Menurut May (2001), pandangan ini sesuai dengan batasan Ernest Gellner (1983: 1) tentang nasionalisme sebagai suatu teori tentang legitimasi politis. Menurut Gellner (1983: 1) batasan etnik seharusnya tidak boleh berkontradiksi dengan batasan politis (*ethnic boundaries should not cut across political ones*). Dengan kata lain, batasan etnik harus sama dan sebangun dengan batasan politis.

Konsekuensi dari imperatif politis (*political imperative*) seperti ini adalah mendirikan atau membangun suatu negara-bangsa yang secara etnis eksklusif dan secara budaya dan bahasa homogen. Model "ideal" ini masih menginspirasi sebagian besar negara-bangsa (dan pergerakan kaum nasionalis), meskipun, sebagaimana kita lihat, di depan kita, ada suatu realitas multietnik dan multilingual yang jauh lebih kompleks dan menantang. May (2001: 7), mengutip Dorian (1998: 18) dan Coulmas (1998: 67), mengatakan bahwa konsep negara-bangsa berpasangan dengan bahasa yang menggunakan standar bahasa resmi. Pada abad

modern ini, konsep tersebut telah menempatkan ancaman yang paling hebat terhadap identitas dan bahasa komunitas kecil (minoritas). Dengan mengobservasi secara ringkas negara-bangsa yang muncul sejak Revolusi Perancis, May menyimpulkan bahwa negara-bangsa secara alamiah adalah musuh terhadap minoritas. Dengan kata lain, Foley (1997: 398-400) mengatakan bahwa negara-bangsa dan bahasa standar merupakan hasil dari perjuangan antara kelompok politik dan ekonomi yang berkompetisi di Eropa pada abad ke-19 untuk kepentingan mereka sendiri.

May beranggapan bahwa negara-bangsa mendapat tekanan dari dua arah: atas dan bawah. Tekanan dari atas timbul karena munculnya globalisasi yang telah mempersyaratkan negara-bangsa modern untuk mengevaluasi kembali batasan kedaulatan politis dan ekonomisnya. Tekanan dari bawah berasal dari kelompok minoritas yang makin mendesak haknya untuk membentuk negara-bangsanya sendiri dan mendesak keterwakilan atau perwakilannya yang lebih besar di dalam struktur negara-bangsa yang ada. Perkembangan terakhir ini dan implikasinya bagi organisasi sosial, budaya, dan politik negara-bangsa adalah isu yang paling relevan dengan isu tentang hilangnya bahasa minoritas. Akibatnya, kelompok minoritas mulai dan makin mempertanyakan dan menentang prinsip dan efek "negara-bangsa yang sama dan sebangun" itu. Dalam proses itu, May menyimpulkan bahwa identitas nasional, parameternya, dan elemen konstituennya telah terbuka untuk diperdebatkan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan bilingualisme dan multikulturalisme.

Multilingualisme atau keberagaman bahasa dalam kenyataannya sering dipandang sebagai suatu ancaman bagi *nation-building* yang damai dan berhasil dalam suatu negara-bangsa (*nation-state*). Namun, dari sisi lain, keberagaman itu sering dibanggakan sebagai suatu kekayaan. Bahkan, untuk kasus Indonesia, Haryatmoko (2003:185) ketika mengulas tentang hukum, moral, dan etika politik dalam masyarakat majemuk, mengatakan bahwa dalam konteks hukum, kemajemukan masyarakat (Indonesia)¹ lebih merupakan kutuk daripada berkat.

Sementara itu, O'Reilly (2001: 68) berpendapat bahwa pada

¹ Tanda kurung dibuat oleh penulis sendiri

² Cetak miring sengaja dibuat oleh penulis untuk dibedakan dengan bahasa persatuan

hakikatnya hak bahasa minoritas, secara sosiologis maupun politis, dapat dipertahankan dalam dunia modern. Perjuangan hak sipil dan asasi manusia, lanjutnya, sangat sering dikaitkan atau terkait dengan isu bahasa. Dengan terus berkurangnya keberagaman bahasa karena bahasa mulai punah dan didominasi atau dihegemoni oleh sejumlah kecil *bahasa negara*², bahasa daerah (atau bahasa minoritas) itu harus berjuang keras untuk mendapatkan ruang hidup.

Secara teoretis, politik bahasa sebagai jalan untuk mendapatkan alat pemersatu komunikasi dalam negara-bangsa yang multietnik mungkin berhasil membangun suatu bangsa sebagai suatu *imagined community* (lihat Anderson 1990) dan sekaligus membuat an *imagined language community* (lihat Gal 1998; Silverstein 2000; Josep 2003; Schmid 2001; dan Davies 2004). Namun, apakah *imagined community* atau *imagined language community* itu juga dengan serta-merta dan dengan sendirinya dapat menghilangkan keberagaman etnik dan membentuk satu budaya nasional yang homogen dalam satu negara-bangsa yang sama dan sebangun (*a nation-state congruence*) (lihat May 2001), merupakan pertanyaan utama yang dikutip dalam tulisan ini.

Apakah bahasa bisa “diseragamkan” dan sampai ke tingkat mana keseragaman itu bisa diperoleh, adalah pertanyaan yang relevan untuk dipersoalkan. Menurut Joseph (dalam Davies 2004: 351), ada dua modus pendekatan sosial dan politik, yaitu modus pendekatan sosial-politik Saussure dan modus pendekatan sosial-politik Voloshinov. *Pertama*, modus Saussure, dengan analisis bahasa atas *langue* dan *parole*, sampai pada suatu pemahaman sosial tentang apa yang dapat mengikat orang. Dalam hal ini adalah standarisasi bahasa yang berjalan bersamaan dengan standarisasi pikiran. Pada sisi lain ini, modus Saussure ini juga bisa dilihat sebagai hegemoni pihak “penguasa” yang berdiri sebagai pihak yang memproduksi “bahasa” terhadap masyarakat pemakainya sebagai konsumen yang pasif. Kemudian, apakah bahasa bisa distandarkan juga? Bahasa, secara realitas, tetap mempunyai bentuk-bentuk yang tidak standar dan bentuk seperti itulah yang justru digunakan oleh mayoritas masyarakat.

Kedua, modus pendekatan sosial-politik Voloshinov. Voloshinov dan Bahktin melihat bahwa bahasa adalah sebuah konstruksi sosial dalam proses interaksi mereka. Oleh karena itu, bahasa dikondisikan oleh organisasi sosial di sekitar interaksi itu. Bahasa itu menyatu dengan

masyarakatnya. Menurut Voloshinov, kreativitas linguistik tidak dapat dipahami terlepas dari makna ideologis dan nilai yang ada di dalamnya. Dalam konteks ini kita melihat keberadaan dan kekhususan bahasa lokal, peran dan pentingnya dalam kehidupan masyarakat lokal (Voloshinov 1973: 23).

Secara empiris telah ditemukan sejumlah kenyataan yang berhubungan dengan isu politik bahasa negara, negara-bangsa dan bahasa lokal dan etnik. Beberapa disertasi dan penelitian tentang politik bahasa, baik di negara bekas jajahan maupun di negara-bangsa serta penelitian penulis sendiri, membahas persoalan tersebut di atas. Penelitian-penelitian itu telah membuktikan betapa keinginan orang untuk menciptakan negara-bangsa yang sama dan sebangun itu, termasuk dalam aspek bahasanya.

Proyek Teknologi Nasionalisme ala Prancis mengungkapkan bahwa politik bahasa asimilasionis penjajah Prancis terhadap empat komunitas penduduk Senegambian di Afrika Barat, S n gal, telah gagal. Di Amerika Serikat, Schmidt (2007: 1-4), yang meneliti politik bahasa melalui dua pendekatan, yakni assimilationist dan pluralist mengungkapkan bahwa sumber ketidaksepahaman yang terjadi di sana bukan pada suatu ketidaksepahaman terhadap bahasa itu sendiri, melainkan terhadap identitas dan konsekuensi tentang identitas bagi individu, kelompok etnik, dan negara itu secara keseluruhan.

Politik bahasa di Cina, menurut kajian Shih C-Y (2007: 1) di Shenyang, di sebuah sekolah berbahasa Korea, identitas etnik menjadi semakin dikuatkan dengan suatu program bahasa etnik yang dibuat oleh negara dan hal ini membuat negara, bersama-sama dengan sistem bahasa Mandarin-nya, berjalan seiring dan tidak lagi mengancam identitas etnik Korea. Politik bahasa etnik di Cina, menurut Shih (2007), harus dianggap berhasil bukan karena politik bahasa di Cina mereproduksi identitas ini atau itu, atau bukan karena politik bahasa di Cina mengonsolidasi identitas nasionalistik Cina yang dianggap opresif. Politik bahasa di Cina membiarkan koeksistensi dan hibridisasi identitas etnik lokal.

Scianti (2001), yang meneliti kebijakan bahasa di Afrika Barat, Mauritania untuk disertasinya, mendeskripsikan bahwa politik bahasa di Mauritania berubah sesuai dengan rezim yang berkuasa. Ia menjadi subjek yang menguntungkan rezim yang berkuasa dan menimbulkan kerugian bagi sebagian besar masyarakatnya. Hal ini menjauhkan

harapan kelompok etnis untuk mempunyai akses ke dalam sekolah yang diajarkan dengan bahasa Pulaar. Tuntutan konsesi masyarakat secara yudiridis politis dilayani rezim dengan pendirian lembaga bahasa nasional yang bertujuan mempromosikan bahasa yang dirugikan. Namun, secara *de facto* konsesi itu tidak jalan karena tidak didanai secara memadai.

Di Puerto Rico, Schmidt (2000) melihat dampak desentralisasi dan partisipasi pengembangan kebijakan-kebijakan bahasa pendidikan terhadap kesenjangan pendekatan bahasa atau LAG (*Language Approach Gap*) dari tahun 1900 sampai tahun 1949. Schmidt menemukan bahwa desentralisasi dan partisipasi mempunyai efek yang berbalikan terhadap kesenjangan pendekatan bahasa. Jika desentralisasi dan partisipasi bertambah, kesenjangan pendekatan bahasa berkurang. Sebaliknya, jika desentralisasi dan partisipasi berkurang, kesenjangan pendekatan bahasa bertambah.

Di Indonesia aspek kajian ini masih berupa isu karena selama pemerintahan yang lalu, baik pada masa Orde Lama maupun pada masa Orde Baru, politik bahasa nasional dan daerah menjadi topik yang sangat sensitif dan sedapat mungkin dihindari. Hal ini disebabkan oleh cara pandang yang cenderung menganggap bahwa persoalan itu sudah selesai dan persatuan itu sudah jadi, bahkan semenjak pengucapan Sumpah Pemuda dan Proklamasi. Mempersoalkannya kembali, pada satu sisi, akan langsung bersinggungan dengan kepentingan nasional, persatuan, dan kesatuan bangsa. Hal ini mungkin menjadi lebih jelas kebenarannya bila dikaitkan dengan fenomena bahasa di menara Babel dan otonomi daerah yang dilihat sebagai ancaman separatisme.

Djohan (2002: 63) yang mengutip Legge dalam Sjamsuddin (1989: 24) mengungkapkan bahwa pemerintahan sebelum masa Orde Baru juga berkelakuan serupa dengan Orde Baru terhadap otonomi daerah yang diatur dengan selera kolonial, yakni pemerintah pusat menumbuhkan kekuasaannya di daerah seolah-olah ia adalah pemerintahan asing (lihat juga Roshwald 2001: 215-217). Djohan (2002: 63), mengamati

³ Penulis mengamati bahwa topik-topik tulisan lepas tentang bahasa dan budaya lokal, bahkan yang langsung berhubungan dengan politik bahasa mulai lebih sering muncul dalam koran-koran nasional seperti Kompas dan Jawa Pos, sejak runtuhnya Orde Baru terlebih sejak berlakunya UU No.22 tahun 1999.

hal yang sama dalam Orde Baru yakni apresiasi budaya lokal selama Orde Baru hanya bersifat simbolik, seperti terhadap makanan daerah, pakaian daerah, rumah adat, lagu daerah, dan senjata tradisional.

Akibatnya, timbul kesulitan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian di Indonesia tentang hubungan bahasa negara, negara-bangsa dengan bahasa lokal, sebagaimana dialami penulis dalam usaha mengkaji hasil penelitian yang berhubungan dengan ini.³ Bahkan, dalam tataran wacana saja isu itu sangat sensitif kalau tidak hendak dikatakan tabu.

Namun demikian, dalam tulisan lepas di media massa dan dalam lingkup akademis isu itu tidak luput dari perhatian dan pembahasan. Suryadi (1995), misalnya, dalam tulisan lepasnya melihat bahwa pada era transformasi orang Jawa menjadi orang Indonesia, budaya Jawa menjadi bagian budaya Indonesia, bahasa dan sastra Jawa menjadi bahasa dan sastra etnik di Indonesia. Hal itu membawa masalah yang perlu dijadikan bahan dialog.

Kayam (1984) sebagaimana dikutip Tirtosudarmo (2002: 341) mengusulkan siasat yang cocok dalam bentuk kebijakan yang mendorong berbagai lingkungan budaya yang ada dalam negara kebangsaan ini untuk menemukan sendiri dinamika kreativitas mereka masing-masing (tetapi) masih dalam kerangka negara kebangsaan yang baru. Kreativitas budaya/bahasa daerah diharapkan menemukan dinamikanya. Budiman (1999) juga membahas secara panjang-lebar persoalan itu dalam *Jatidiri Budaya dalam Proses Nation-building: Mengubah Kendala Menjadi Aset*. Dia menyimpulkan bahwa pandangan *nation* sebagai segala-galanya perlu dikoreksi sehingga kemajemukan tanda budaya yang pada saat ini ada dan merupakan fakta tidak boleh dikorbankan demi persatuan dan kesatuan yang kerap diasosiasikan dengan titik final proses *nation-building*. Bahasa sebagai salah satu tanda, bahkan, inti tanda budaya, perlu dilestarikan. Teori, pemikiran, temuan, dan pertanyaan di atas mendasari kajian politik bahasa dalam konteks Indonesia ini, khususnya masyarakat Lamaholot.

Dalam tulisan ini politik bahasa nasional sebagai suatu keputusan politik yang diambil oleh pemerintah dikaji dampaknya terhadap kebudayaan daerah, khususnya atrisi bahasa Lamaholot serta akibat yang mengikutinya di satu sisi, dan terhadap nasionalitas dan/ atau sentimen etnis di sisi lain. Fenomena sosial pokok yang dikaji adalah

dampak keputusan politik bahasa nasional terhadap bahasa dan kelompok etnis Lamaholot serta sentimen nasionalisme dan/ atau etnik yang ditimbulkannya antardua generasi (*across generation*) saat ini.

Masalah

Masalah utama yang dibahas dalam artikel ini adalah tidakkah ada dampak politik bahasa nasional terhadap bahasa dan etnis Lamaholot lintas generasi saat ini? Masalah pokok ini kemudian dioperasionalkan ke dalam submasalah sebagai berikut.

1. Betulkah penerimaan masyarakat penutur “asli” (*native speakers*) bahasa Lamaholot terhadap politik bahasa nasional bervariasi menurut generasi dan komposisi masyarakatnya?
2. Betulkah politik bahasa nasional melahirkan identitas ganda, yakni nasionalis Indonesia dan kelompok etnis Lamaholot ?

KERANGKA TEORI

Sebagai upaya untuk menjelaskan fenomena sosial yang dikaji, argumen teoretis yang dipikirkan adalah sebagai berikut. Hegemoni negara yang sentralistik melalui politik bahasa yang *assimilationist*, yang mempromosikan bahasa nasional (bahasa Indonesia) terhadap kelompok masyarakat/etnis di Indonesia, termasuk masyarakat/etnis Lamaholot melalui pendidikan semenjak Taman Kanak-Kanak, menciptakan situasi konflik dilematis antara tujuan pembentukan negara-bangsa (*nation-state*) di satu sisi, dan pemertahanan dan pengembangan budaya dan bahasa lokal/etnik termasuk kelompok etnis Lamaholot di sisi lain. Dominasi yang efektif terhadap budaya dan bahasa lokal melalui promosi bahasa nasional ini, pada gilirannya, menimbulkan alienasi dan amnesia budaya dan bahasa Lamaholot. Pada masa sekarang ini, demokratisasi dan reformasi dalam bentuk pemberian otonomi, membawa pencerahan tentang hak komunitas minoritas dalam negara-bangsa untuk menjelaskan posisi dan kehadirannya dalam negara-bangsa.

Di samping argumentasi teoretis seperti itu, penjelasan teori Giddens tentang identitas (*plurality of social identities*) juga bisa menjelaskan fenomena ini. Menurut Giddens (2001: 29-30), ketika berbicara tentang identitas, *setting* budaya tempat kita dilahirkan dan menjadi dewasa memengaruhi tingkah laku kita; kenyataan bahwa sejak lahir hingga

mati seseorang bergumul dalam interaksi dengan orang lain tentu saja mengondisikan kepribadiannya, nilai-nilai yang dia pegang, dan tingkah laku yang ditunjukkannya. Dalam proses sosialisasi seperti ini, seseorang mengembangkan identitas⁴ dan kapasitasnya. Identitas, lanjut Giddens, ada dua macam, yakni identitas sosial dan identitas diri. Keduanya secara analitis berbeda, namun sangat erat berhubungan satu dengan yang lain. Identitas sosial (*social identity*) merujuk kepada karakteristik yang diatribusikan kepada individu oleh orang lain dan memberikan markah cara individu tersebut "sama" dengan orang lain. Jadi, identitas sosial melibatkan suatu dimensi kolektif, yaitu identitas yang dimiliki bersama (*shared identities*). Sebaliknya, identitas diri (*self-identity*) menempatkan seseorang terpisah dari orang lain sebagai individu yang berbeda. Identitas diri, lanjutnya, merujuk kepada proses pengembangan diri yang melaluinya seseorang memformulasikan rasa unik tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan dunia di sekitarnya.

Sebagian besar individu, lanjut Giddens, memiliki identitas sosial lebih dari satu atribut (*multiple social identities*) dan hal ini mencerminkan banyaknya dimensi kehidupan manusia. Individu secara terus-menerus bernegosiasi dengan dunia luar yang membantunya menciptakan dan membentuk makna dirinya sendiri. Pluralitas identitas sosial ini dapat menjadi sumber potensi konflik.

Berdasarkan uraian Giddens tentang identitas di atas, dapat dinyatakan bahwa orang Lamaholot sebagai suatu identitas sosial melalui politik bahasa nasional yang diimplementasikan via pendidikan di sekolah, bernegosiasi dengan dunia luarnya, menciptakan dan membentuk dirinya menjadi orang Indonesia. Orang Lamaholot menjadi orang Indonesia. Perubahan seperti ini mungkin serupa dengan pernyataan Giddens (2001: 30), bahwa perubahan identitas dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, suatu perubahan yang menjauh dari faktor-faktor tertentu dan turun-temurun yang semula menjadi penentu formasi identitas (*a shift away from the fixed, inherited factors that previously guided identity formation*). Dengan kata lain, politik bahasa nasional tidak menghilangkan identitas Lamaholot melainkan memberikan atribut tambahan baru (orang Indonesia) kepada atribut yang sudah ada sebelumnya (orang Lamaholot) sehingga memberikan identitas tambahan baru, menjadi identitas ganda kepada orang Lamaholot.

⁴ Cetak miring dibuat sendiri oleh penulis.

METODOLOGI

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang melihat praktik sebagai aksi, dibentuk oleh makna dan nilai: pemahaman psikologis (*psychological verstehen*) pemahaman empatis (*empathetic understanding*), dan pendekatan yang paling konstruktivis (*most constructivist approaches*) (Denzin dan Yvonna Lincoln 2000: 574-576). Pemahaman subjektif subjek penelitian ini tentang (i) penerimaan dan/ atau resistensi penutur asli bahasa dan budaya Lamaholot terhadap politik bahasa nasional dan (ii) keindonesiaannya dan/ atau kelayaholotannya saat ini fokus penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Masyarakat bahasa yang diteliti adalah masyarakat bahasa Lamaholot Barat (LB), yang menurut Keraf (1978) terbagi ke dalam 23 dialek. Struktur masyarakat LB secara sederhana dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yakni masyarakat LB yang homogen dan heterogen. Kelompok yang homogen itu berada jauh dari ibukota kabupaten dan jauh dari pusat pelayanan publik, sedangkan kelompok lain berada di dekat atau sekitar ibukota kabupaten dan pusat pelayanan publik dan pemerintahan.

Informan penelitian ini diambil dari empat pulau itu, yakni Flores Timur, Solor, Lembata, dan Adonara. Di Flores Timur, informan kunci diambil dari wilayah Ile Mandiri (Tanjung Bunga, Lewokluok, Baipito, Waibalun, dan Lewolema), Pukaunu (Gerong/Kanada). Di Solor informan kunci berasal dari Pamakayo dan Balaweling. Di Adonara informan kunci berasal dari Waiwadan, Ile Boleng, Klubagolit. Di Lembata informan kunci yang diambil berasal dari Ile Ape, Lamalera, Lebatukan, dan Nubatukan.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah anggota kelompok masyarakat bahasa LB, yang dalam kesehariannya menggunakan dan memelihara bahasa dan budayanya. Subjek penelitian ini hanya dibedakan atas dua saja, yakni kelompok generasi tua (usia 60-80-an) dan kelompok generasi muda (usia 30 – 50-an). Masing-masing kelompok terdiri dari 25 informan kunci sehingga menjadikan keseluruhan jumlah informan kunci 50 orang.

Informan kunci penelitian ini adalah pemuka masyarakat yang mengetahui atau terlibat secara langsung dalam persoalan yang menyangkut politik bahasa dan penerapannya di dalam masyarakat. Praktisnya mereka adalah orang yang terlibat dalam persoalan politik bahasa, yakni guru, orangtua, dan tokoh masyarakat seperti kepala desa, pegawai negeri sipil atau pensiunan, pemimpin agama, serta anggota masyarakat lain, seperti pemimpin masyarakat adat, dan mereka yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan bahasa pada umumnya seperti seniman lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Politik Bahasa terhadap Bahasa Lamaholot

Pengaruh politik bahasa nasional terhadap bahasa Lamaholot dapat dibedakan ke dalam empat cara penerimaan, yakni (i) menerima bahasa Indonesia, (ii) menolak (resisten terhadap) bahasa Indonesia, (iii) atrisi bahasa Lamaholot, dan (iv) menguatkan/memelihara bahasa Lamaholot. Keempat cara penerimaan ini kemudian ikut memberikan warna kepada etnisitas Lamaholot dan nasionalitas Indonesia orang Lamaholot.

Penerimaan masyarakat penutur bahasa Lamaholot terhadap bahasa Indonesia disebabkan oleh setidaknya dua hal utama, yakni kondisi masyarakat Lamaholot itu sendiri dan kedua oleh karena status dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. *Pertama*, masyarakat Lamaholot mempunyai kondisi yang sangat bervariasi dan terkotak-kotak ke dalam dialek yang berbeda⁵ serta keengganan untuk menggunakan dialek yang lain daripada dialeknya sendiri. Hal ini dapat menimbulkan pilihan yang tak terhindarkan kepada penggunaan bahasa yang lain sama sekali dari dialek-dialek itu, yaitu bahasa Indonesia, yang digunakan sebagai instrumen komunikasi di antara sesama Lamaholot. Mungkin di sinilah letak sebab dan bedanya dengan kasus bahasa etnik di negara-negara

⁵ Ingat, bahwa sebagaimana sudah disinggung di bagian depan, variabilitas masyarakat bahasa Lamaholot itu hancur sampai ketinggian *lewo* yang kecil dan etnik Lamaholot merupakan etnik campuran, tidak seperti etnik di daerah kontinental yang relatif tunggal.

kontinental Afrika dan Amerika dibanding kasus bahasa etnik di negara kepulauan seperti Indonesia.⁶

Kedua, dari sudut bahasa Indonesia itu sendiri, status dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional/negara yang digunakan di dalam bidang pendidikan dan pengajaran serta berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya yang multi etnik itulah yang membuat penutur asli bahasa Lamaholot menerima dan menggunakannya sebagai bagian dari bahasa dalam kehidupannya, bahasa kedua. Di samping itu, penerimaan terhadap bahasa Indonesia juga merupakan keinginan penutur asli bahasa Lamaholot sendiri, sebagai sesuatu yang lain maupun yang mirip dengan bahasa tetangganya (Melayu Larantuka) yang sekaligus memberikan nilai tambah dalam pergaulannya di tengah masyarakat yang menjadi pusat pemerintahan (Larantuka).

Penerimaan terhadap bahasa Indonesia dengan alasan-alasan seperti ini, pada gilirannya menimbulkan harapan, bahkan semacam “tuntutan”, dari kalangan penutur asli bahasa ini agar etnik yang lain juga menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi antaretnik yang berbeda, dalam ranah publik, dan khususnya dalam pemerintahan. Dengan demikian, dalam pernyataan tersebut tersirat penerimaan penutur asli bahasa Lamaholot terhadap etnik lain akan menjadi lebih baik bila etnik lain itu menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengannya, terlebih dalam ranah publik dan pemerintahan.

Resistensi masyarakat penutur asli bahasa Lamaholot terhadap bahasa Indonesia pada awalnya dirasakan oleh generasi tua. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman, resistensi penutur bahasa itu mulai berkurang, bahkan hampir tidak ada, baik generasi tua itu sendiri maupun, lebih-lebih, generasi muda. Resistensi itu terjadi

⁶ Perhatikan kasus wolofisasi yang terjadi di Afrika dan kasus Quebec di Canada, serta (mungkin juga) Puerto Rico, Amerika Serikat. Wolofisasi di Afrika relatif lebih luas dan masyarakatnya tidak terkotak-kotak lagi seperti halnya masyarakat Lamaholot ke dalam pulau-pulau dan Paji-Demon yang saling-silang. Di samping itu, bahasa yang diperkenalkan di Afrika tidak sama dengan di Indonesia. Wolofisasi di Afrika terjadi karena bahasa yang dikenalkan adalah bahasa penjajah, sedangkan Indonesianisasi yang terjadi di Indonesia yang dikenalkan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia bukan bahasa penjajah, bahkan bukan milik salah satu etnik secara eksklusif melainkan telah terlebih dahulu menjadi lingua franca di daerah pesisir wilayah Indonesia sekarang, termasuk di wilayah Lamaholot sendiri. Demikian pula bedanya dengan Quebec di Canada yang terlebih dahulu sudah didominasi oleh masyarakat yang berbicara bahasa Prancis dan Puerto Rico, Amerika Serikat, yang terlebih dahulu sudah didominasi oleh masyarakat yang berbicara bahasa Spanyol (lihat Schmid 2001:137138; 175). Di samping bahasa, Quebec dan Puerto Rico yang sama-sama memiliki homogenitas yang lain selain bahasa, yakni agama.

bukan karena bahasa Indonesia itu sendiri, melainkan karena beberapa metode pengajaran yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia (bahasa Melayu) waktu itu, dan karena tuntutan untuk menggunakan bahasa Lamaholot dalam ranah adat istiadat (sampai sekarang) yang dirasakan lebih ekspresif mewakili hati dan rasa kelamaholotannya daripada menggunakan bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia. Di samping itu, bagi generasi ini juga, penggunaan nama dan simbol Lamaholot lebih menjadi pilihan untuk memelihara rasa kelamaholotannya daripada nama dan simbol lain yang mencerminkan adat istiadat dan budaya etnik lainnya. Di sini pula sebenarnya terdapat resistensi terhadap bahasa negara Indonesia yang feodalistis dan tidak egaliter. Resistensi menjadi sangat nyata bila bahasa etnik atau golongan agama tertentu atau yang lainnya (saja) yang digunakan dalam ranah publik dan pemerintahan, khususnya oleh pejabat dalam media massa seperti surat kabar dan siaran televisi nasional. Pemeliharaan kelamaholotan, akhir-akhir ini juga mulai disuarakan oleh generasi muda Lamaholot yang dalam pergaulannya dengan etnik lain akhirnya menemukan bahwa tidak ada salahnya mereka juga menggunakan dan memelihara simbol-simbol kelamaholotannya dalam negara yang multietnik ini. Pemeliharaan kekhasan etnik ini dimaksudkan untuk menunjukkan identitasnya sekaligus memperkaya khasanah budaya bangsa multietnik ini

Atrisi atau pengurangan profisiensi penutur asli bahasa Lamaholot terhadap bahasanya sendiri adalah konsekuensi yang hampir tidak dapat dielakkan akibat penyusupan bahasa Indonesia ke dalam kehidupannya sejak awal (melalui pendidikan) dan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Hal ini sangat dirasakan di dalam komunitas Lamaholot yang heterogen, yang berada dekat dengan atau di dalam pusat pemerintahan dan pelayanan publik yang dalam kesehariannya penggunaan bahasa Indonesia merupakan kelaziman. Dalam kelompok masyarakat ini kecemasan tentang atrisi bahasa Lamaholot diakui tidak saja oleh generasi tua, tetapi juga oleh generasi mudanya. Kecemasan yang mungkin lebih cocok diimbuhi dengan keputusan. Meskipun demikian, anggota kelompok masyarakat ini juga menaruh harapan akan penyelamatan bahasa sebagai aset budaya khas daerahnya.

Pada sisi lain lagi, dampak politik bahasa nasional juga memunculkan pemeliharaan bahasa Lamaholot. Keinginan dan usaha pemeliharaan bahasa (dan budaya) Lamaholot ini lebih dirasakan dan dilaksanakan di

dalam masyarakat Lamaholot yang pekat terkonsentrasi dan terisolasi dari pencampurannya dengan etnik lain. Di dalam kelompok ini bahasa Lamaholot secara alamiah digunakan dan terpelihara dengan baik. Hal ini sejalan dengan Laponce (dalam Hawkesworth dan Kogan 1992:592-595) ketika membicarakan homogenitas teritorial kebahasaan (*linguistic territorial homogeneity*).⁷ Kecemasan tentang atrisi tidak dirasakan di dalam masyarakat ini.

Penggunaan satu bahasa tidak berarti melenyapkan bahasa yang lain. Bahasa yang satu diperlukan dalam ranah yang satu, sedangkan bahasa yang lain diperlukan dalam ranah yang lain lagi. Hal ini sangat disadari oleh pendiri negara-bangsa sejak awal ketika merencanakan wujud negara-bangsa yang hendak dibangun melalui Sumpah Pemuda. Khusus untuk bahasa, bunyi sumpah pemuda bukannya “mengaku berbahasa satu” melainkan “menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Oleh karenanya, tidak perlu dan tidak boleh menghilangkan keragaman bahasa yang ada bila kita setia kepada sumpah itu.

Selain itu, mengikuti pemikiran Orwell yang novelnya mengkritik orthodoxy Marxis, pemerintah hendaknya tidak memelihara suatu orthodoxy di dalam masyarakat bahwa masyarakat bahasa pluralis tidak baik untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, atau bahwa pluralitas mengancam kesatuan bangsa. Orthodoxy seperti itulah yang memberikan pembenaran terhadap upaya standarisasi bahasa dalam semua aspek atau ranah kehidupan bangsa dengan hegemoni bahasa Indonesia dan homogenisasi masyarakat bahasa Indonesia.⁸ Bila ini terjadi, seperti halnya kritik Orwell (1946) terhadap standarisasi bahasa Inggris, pemerintah membuat standarisasi bahasa berjalan bersamaan dengan standarisasi pikiran. Hal ini mendudukkan penguasa pada pihak yang memproduksi makna dan masyarakat menjadi penggunaanya saja. Sementara itu, dalam realitas yang dapat diamati (*observable reality*) tidaklah demikian. Realitas objektif adalah bahwa tetap ada bentuk-bentuk bahasa yang tidak standar, yang justru digunakan oleh mayoritas anggota masyarakat. Oleh karena itu, bahasa manusia tidak dapat diseragamkan.

⁷ Bandingkan dengan “hak komunitas bahasa tuan rumah (the rights of host language community)”

⁸ Kecenderungan mau melihat Indonesia yang satu ini juga bisa menimbulkan sikap ketidaktoleranan masyarakat Indonesia akan perbedaan, bahkan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa orang takut dengan perbedaan. Masyarakat Indonesia ini heterogen dan mungkin tidak akan bisa menjadi homogen.

Pengaruh Politik Bahasa terhadap Etnisitas dan Nasionalitas Orang Lamaholot

Politik bahasa nasional yang asimilasionist itu, yang sejak dulu diyakini sebagai pintu masuk ke suatu pemahaman diri kolektif suatu kelompok (nasionalisme kultural), mempunyai dampak terhadap etnisitas dan nasionalisme orang Lamaholot. Dampak tersebut dapat dilihat dari sudut pandang enam kriteria Smith (1986: 109-110 dalam Johnson 2001: 169) tentang *ethnic origins of nations* maupun yang lebih khusus lagi dari segi *linguistic accomodation* yang disampaikan Giles dan Powesland (1975,1977)

Etnisitas orang Lamaholot dalam perjalanan waktu dan sejarah, bukanlah kelompok etnis yang tunggal, melainkan berasal dari dan terjalin melalui proses pembauran berbagai unsur budaya. Lamaholot itu sendiri merupakan generalisasi secara etik dan bukan sebuah emik yang secara umum dikenal di seluruh kalangan Lamaholot. Meskipun demikian, kata itu mulai berpengaruh untuk membangkitkan kenangan tentang keterikatan dan keterkaitan kelompok-kelompok Lamaholot yang ada sekarang tentang kesamaan asal-usul, mitos, kenangan historis, tanah atau daerah asal usul, adat, dan agamanya.

Keterikatan etnik Lamaholot terhadap tanah asal-usul atau kelahiran merupakan keterikatan khusus, yang dalam hal-hal tertentu di tempat tertentu keterikatan ini bahkan lebih kuat (diutamakan) daripada darah dan keturunan. Etnisitas orang Lamaholot terpecah-pecah ke dalam kelompok yang ada dan pada umumnya ke dalam Lewo. Meskipun begitu, akhir-akhir ini cenderung meluas bergantung pada kepentingan dan tidak bersifat permanen. Perluasan pemahaman etnisitas orang Lamaholot ini merupakan proses sosialisasi yang alamiah akibat interaksi sesama anggota masyarakat Lamaholot maupun antaranggota masyarakat itu dengan masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Giddens (2001: 29), dalam proses sosialisasi kita mengembangkan suatu rasa identitas, identitas sosial maupun identitas diri. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mendieta (dalam Alcoff dan Eduardo Mendieta 2003: 407), yakni identitas tidak pernah satu suara (*univocal*), tidak pernah tetap (*stable*) atau tak bercela (*innocent*). Identitas, lanjutnya, selalu merupakan suatu pencapaian (*an accomplishment*) dan sebagai suatu proyek yang tidak pernah berhenti (*a ceaseless project*).

Etnisitas orang Lamaholot, bila ditempatkan dalam persoalan bahasa khususnya menurut cara pandang Giles dan Powesland (1975, 1977) tentang *linguistic accomodation*, menunjukkan hal yang menarik. Di antara sesama Lamaholot di dalam wilayah Lamaholot lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia kalau bukan modus divergensi (menggunakan bahasa (dialek)nya sendiri) untuk mempertegas *in-group*.⁹ Di antara sesama Lamaholot di luar wilayah Lamaholot lebih cenderung digunakan modus konvergensi¹⁰ (menggunakan bahasa Lamaholot yang lebih diterima) dan/atau menggunakan bahasa Indonesia, seperti halnya dalam komunikasi dengan anggota kelompok etnik Indonesia non-Lamaholot lain. Dengan demikian, politik bahasa mempunyai dampak terhadap pemberian pilihan bagi orang Lamaholot, yang tidak satu itu. Bahasa Indonesia dijadikan pilihan yang “aman” dalam berkomunikasi dengan sesama anggota kelompok etnik Lamaholot, baik di dalam wilayah Lamaholot sendiri maupun di luar wilayah Lamaholot, di antara sesama Lamaholot maupun dengan mereka yang non-Lamaholot. Oleh karena itu, bahasa Indonesia menjadi “pengikat” lapis kedua bagi sesama Lamaholot dan “pengikat” lapis pertama antara orang Lamaholot dan orang Indonesia etnik non-Lamaholot lainnya.

Di pihak lain, penggunaan bahasa (etnik) Lamaholot (*ethnolinguistic vitality*) akhir-akhir ini cenderung menjadi trend untuk menggalang dukungan politik dari kelompok Lamaholot dalam berbagai kegiatan politik, baik di wilayah Lamaholot sendiri maupun di luar Lamaholot. Meskipun begitu, pemanfaatan kesamaan bahasa ini tidak dengan sendirinya menghilangkan perbedaan yang ada di antara mereka karena memang antara sesama Lamaholot perbedaan itu masih dan tetap terpelihara dengan baik. Loyalitas terhadap bahasa kelompoknya sendiri (*linguistic loyalty*) dan toleransi terhadap perbedaan yang ada di antara kelompok sesama bahasa Lamaholot ini menurut penulis

¹⁰ Di sini penggunaan bahasa Lamaholot dari kelompok mana saja tidak menjadi persoalan yang berarti karena tujuannya untuk menciptakan kesan persatuan sehingga walaupun ada perbedaan, perbedaan itu diabaikan.

⁹ Seperti umumnya tujuan akomodasi bahasa, yakni sebagai penyesuaian identitas yang dilakukan untuk meningkatkan status kelompok dan menciptakan kesenangan, hal ini menjadi tidak berlaku bila tujuan jelas-jelas untuk mendapatkan penerimaan atau mendatangkan kesan sebagai bagian dari kelompok. Untuk maksud ini, pilihan terhadap penggunaan bahasa yang lebih cocoklah (*favourable*) yang dilakukan.

membuat orang Lamaholot lebih mudah menerima perbedaan yang ada (kalau tidak mau dikatakan sebagai “terbiasa” menerima perbedaan). Hal ini terjadi karena kemajemukan masyarakat Lamaholot¹¹ itu sendiri yang dalam kesehariannya hidup saling bergantung antara kelompok satu dan yang lain.

Nasionalisme (Indonesia) orang Lamaholot dibangun melalui bangku sekolah yang diberikan lewat pendidikan dan pengajaran yang ada pada setiap tataran pendidikan melalui pendidikan bahasa Indonesia, sejarah dan pendidikan moral Pancasila serta mata pelajaran lain. Nasionalisme orang Lamaholot dibangun sejak lama melalui pendidikan. Hal itu juga membangun harapan sekian lama akan perbaikan nasib dan kemakmuran hidup dalam bentuk kemudahan-kemudahan mendapatkan lapangan pekerjaan menyambung hidup keluarga. Nasionalisme dalam harapan ini tak kunjung datang sehingga memaksa mereka pergi pulang merantau, bahkan hingga ke negeri seberang, negeri yang dalam pengamatan para perantau tidak lebih kaya daripada, Indonesia, negerinya sendiri. Nasionalisme (Indonesia) mereka adalah nasionalisme yang menumbuhkan harapan dan tuntutan kepada pembesar dan pengelola negara dan bangsa ini untuk tidak hanya memperkaya diri dan berdiri untuk melayani kepentingan semua etnik (bukan etniknya sendiri), termasuk etniknya yang terkesan terlupakan. Nasionalismenya adalah nasionalisme yang mengharap dan menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nasionalitas orang Lamaholot tidak perlu dipertentangkan dengan rasa kelamaholotannya dan, dalam banyak hal, keduanya ada dalam relasi yang sangat harmonis dan saling melengkapi karena nasionalitas dan etnisitas mempunyai entitasnya sendiri-sendiri. Loyalitas orang Lamaholot terhadap bangsa dan negara ini sejalan dengan loyalitasnya terhadap kultur dan bahasanya dalam ranahnya sendiri-sendiri, bahkan bila diperlukan saling melengkapi.

Oleh karena itu, nasionalisme Indonesia juga tidak perlu meniadakan etnisitas (Lamaholot) ataupun sebaliknya. Nasionalisme Indonesia yang ditumbuhkan kemudian (melalui pendidikan di sekolah) telah menjadi milik mereka tanpa perlu menghilangkan etnisitas mereka yang lebih

¹¹ Tentang kemajemukan masyarakat Lamaholot, sebagai salah satu contoh kasus, Barnes (2004) dalam *Antropologi Indonesia* 74, tahun 2004 melaporkan hasil penelitiannya di Witihama, Adonara.

dahulu ada dan akan tetap ada. Nasionalisme dalam negara-bangsa yang multietnik ini dihayati bukan sebagai fenomena antropologis melainkan sebuah ideologis, nasionalisme sipil. Nasionalisme yang dihayati juga bukan sebagai nasionalisme yang tidak toleran dan kondusif, yang melekat pada autoritanisme, melainkan nasionalisme yang *co exist* dengan etnisitas.

Nasionalisme (Indonesia) orang Lamaholot dengan harapan akan peningkatan kehidupan yang layak dan bebas dari kemiskinan mulai lebih dirasakan dalam perhatian pembangunan di era desentralisasi. Pembentukan kabupaten Lembata yang jelas berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat (Lamaholot) di daerah itu, membangkitkan harapan baru bagi masyarakat Lamaholot, di daerahnya dan di luar daerah. Terwujudnya harapan baru itu akan mengimbau pulang para perantau ke bumi pertiwi, mendulang emas di negerinya sendiri, membangun dan melayani tanah air sendiri.

Bagaimana memelihara dan mengembangkan etnisitas (dan nasionalitas) dalam negara-bangsa adalah persoalan memberikan ruang hidup sesuai dengan ranahnya. Bila hendak memelihara bahasa dan budaya etnik, ruang gerak dan hidup bahasa dan budaya etnik itu perlu diberikan sesuai dengan ranahnya. Di sini mungkin bisa dikutip pandangan Geertz ketika berbicara tentang bangsa dan negara sebagaimana dikutip Hardiman dalam Kymlicka (2003:vii-ix). Negara (*country*) dan bangsa (*nation*), menurutnya, adalah pasangan konsep yang kalau keduanya disamaratakan begitu saja, konsep yang pertama (negeri) akan ditelan oleh yang terakhir (bangsa). Hal ini merupakan imajinasi yang mengecoh karena seolah-olah sebuah negeri didiami oleh satu bangsa saja. Bangsa dijelaskan sebagai kumpulan orang dengan bahasa, darah, sejarah, dan tanah yang sama dan negeri sebagai teritorium atau tanah dari kumpulan orang itu. Imajinasi ini baru disadarkan kekeliruannya oleh perang Balkan. Yugoslavia tercabik-cabik secara internal oleh kekuatan-kekuatan nasional yang sekarang menjadi negara-negara kecil. Jika negeri dan bangsa ingin tetap didekatkan satu sama lain, lanjut Hardiman, mungkinkah dengan memberi makna yang berbeda untuk "bangsa"? Menurut Hardiman (dalam Kymlicka 2003:viii-ix), yang mengutip Geertz (1996: 64), "kita membutuhkan sebuah politik baru: sebuah politik yang melihat penegasan diri, etnik, religi, ras, bahasa, dan regional tidak sebagai irrasionalitas masa silam, yang harus ditekan

atau diatasi. Suatu politik yang memperlakukan berbagai ungkapan kolektif, tidak sebagai kegilaan yang dilecehkan ataupun sebagai emosi yang tak terkenal, melainkan menghadapi berbagai ungkapan kolektif seperti juga menghadapi ketidaksamaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan problem-problem sosial lainnya.” Bangsa, lanjut Hardiman, seharusnya lebih dilihat sebagai *civic nation* daripada *ethnic nation*.

Sebuah politik baru seperti yang dikemukakan oleh Hardiman ini nampaknya sama seperti yang dikemukakan juga oleh Hefner (2007) ketika membahas politik multikulturalisme. Menurut Hefner, jalan menuju demokrasi dan pluralisme civic harus bervariasi. Perlu dibangun sebuah lingkup partisipasi publik yang demokratis, dan didasarkan pada sebuah budaya kewarganegaraan yang inklusif. Demokrasi tidak hanya bergantung pada masyarakat sipil dan struktur politik formal, tetapi juga pada suatu sinergi antara negara dengan masyarakat yang memperdalam disposisi demokratis negara maupun masyarakat. Perspektif pluralis mengenai demokrasi dan kewarganegaraan multikultural melihat jika ada segmen-segmen tertentu dalam masyarakat yang dihalangi dari partisipasi publik oleh kemiskinan atau diskriminasi historis, jangan kita heran jika beberapa anggota kelompok yang tidak diuntungkan itu menuntut langkah-langkah istimewa¹² untuk mengakses sumber-sumber yang dibutuhkan bagi partisipasi yang lebih penuh. Hal itu mungkin sekali mengarah pada seruan-seruan bagi suatu kewarganegaraan yang dibeda-bedakan (*differentiated citizenship*).¹³

Lebih lanjut Hefner mengatakan, jika sebagai hasil dari kecelakaan sejarah atau diskriminasi secara sengaja, salah satu segmen penduduk tidak diberi kesempatan-kesempatan tadi, tidak ada yang tidak demokratis atau tidak adil selain daripada pemberian sumber-sumber bagi perbaikan peluang hidup penduduk yang tidak diberi hak. Hefner menegaskan bahwa tidak ada kontradiksi antara kewarganegaraan demokratis dengan program-program penyetaraan¹⁴ seperti itu, jika

¹² Cetak miring dibuat oleh penulis, bukan aslinya, dengan maksud agar dianalogikan dengan tuntutan-tuntutan perlakuan khusus, seperti otonomi, otonomi khusus, daerah istimewa, daerah khusus, dan sebagainya.

¹³ Istilah ini dipakai Hefner (2007:86) yang mengutip Parekh (1991) yang merujuk kepada pembedaan-pembedaan institusional di antara warga negara yang didasarkan pada etnisitas, gender, ras, atau entah apa pun, untuk memberikan layanan-layanan istimewa kepada kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan itu untuk memperbaiki nasib mereka. Hefner mengakui bahwa hal ini mungkin akan dilihat sebelah mata oleh pasar liberal ataupun akan dikutuk oleh democrat simplisan sebagai “pemaksaan hak-hak kelompok” lebih tinggi daripada ‘hak-hak individual’.

¹⁴ Cetak miring dibuat oleh penulis sendiri sebagai kata kunci.

tujuan mereka dinyatakan dengan tegas dan jelas sebagai usaha untuk menciptakan kondisi bagi partisipasi yang sama. Dengan kata lain, lanjutnya, suatu kewarganegaraan yang dibeda-bedakan menurut etnik, agama, dan jender bisa menjadi sebuah stasiun kecil di tengah jalan panjang menuju partisipasi penuh bagi semua orang.

Nasionalisme bahasa tidak perlu membuat kita mempunyai hanya satu bahasa. Bahkan, lebih daripada nasionalisme bahasa, nasionalisme saat ini lebih berhubungan dengan kesamaan pengalaman, senang dan susah yang dialami bersama, serta kesamaan kemakmuran. Ketidaksamaan kemakmuran merupakan ancaman utama bagi nasionalisme itu sendiri, bukan ketidaksamaan bahasa yang mengancam nasionalisme.

Nasionalisme Indonesia, yang oleh Dhakidae (2003) dikatakan sebagai agama baru yang sudah dengan susah payah disebarkan melalui pendidikan, dalam kenyataannya sudah tersebar ke kalangan bawah, termasuk kalangan masyarakat Lamaholot. Dia bukan lagi menjadi agama baru dan milik segelintir orang nasionalis. Nasionalisme sudah menjadi bayangan dan harapan masyarakat bawah sejak mulai ditanamkannya. Nasionalisme itu sekarang sudah menjadi pengalaman dan pengamatan masyarakat bawah. Pengalaman nasionalisme mereka terusik oleh pengamatan dan pengalaman ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupannya di sekitarnya. Nasionalisme mereka yang terusik karena merasa ditinggalkan sendiri jauh di belakang saudara-saudaranya di tempat lain. Nasionalisme mereka yang terusik karena tidak terangkat dari kemiskinan. Apa yang terjadi mungkin lebih tepat dikatakan sebagai nasionalisme yang mengusik etnisitasnya dan bukannya etnisitas yang mengusik nasionalismenya. Artinya, rasa nasionalisme menjadi terusik ketika mereka melihat kelompoknya tertinggal dari kelompok etnik lain; bukan karena etnisitas mereka yang memenangkan rasa nasionalismenya.

Di samping itu, dalam pengamatan dan berbagai wawancara dengan informan dan tokoh masyarakat, tidak terdengar sekalipun pemikiran separatistis yang selama ini ditakuti oleh sebagian besar kalangan yang menyebut dirinya nasionalis. Hal ini terjadi mungkin karena kesadaran akan ketakberdayaan secara ekonomi, politik, dan sebagainya. Namun, bila kita memberikan alasan hanya sampai di situ, hasil proyek nasionalisme pendidikan Indonesia di daerah itu terabaikan. Mungkin dari situ pula, dapat lebih dipahami alasan Timor Timur tidak lagi

menjadi bagian dari Republik ini dan sekarang menjadi Timor Leste, yang sedang membangun harapan baru.

Implikasi temuan penelitian ini terhadap bahasa, etnisitas, dan nasionalisme orang Lamaholot dalam kaitannya dengan teori yang digunakan memunculkan pertanyaan politik bahasa seperti apakah yang perlu diterapkan di dalam negara-bangsa yang multietnik ini? Menurut hemat penulis, politik bahasa yang tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, tetapi juga tidak menghilangkan atau mengabaikan bahasa etnik. Politik bahasa yang tidak hanya mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, melainkan juga politik bahasa yang menghargai, mengakui, memelihara, dan memberikan ruang hidup yang baik bagi bahasa etnik. Dengan penghargaan, pengakuan, pemeliharaan, dan pemberian ruang hidup yang baik bagi bahasa etnik, kelompok-kelompok etnik yang ada akan merasa diakui, dihargai, dan diterima keberadaannya sebagai bagian dari negara kesatuan yang multietnik ini. Negara yang dimiliki dan memilikinya bersama, negara yang bukan memiliki dan dimiliki etnik tertentu saja.

Dalam rangka menumbuhkan nasionalisme Indonesia, tentu saja bukan hanya politik bahasa, yang perlu dilaksanakan, karena dia akan segera berubah atau sekadar menjadi instrumental bila tidak diikuti dengan nasionalisme kemakmuran (*an imagined welfare community*). Bangsa yang dibayangkan versi Anderson (2001a), khususnya dalam hal bahasa (yakni nasionalisme bahasa), mungkin sudah berhasil dicapai di Indonesia. Dalam hal ini bahasa Indonesia sudah berhasil menjadikan orang Lamaholot, khususnya atau Indonesia, umumnya, sebagai suatu komunitas terbayang (*an imagined language community*). Namun, nasionalisme linguistik itu saja tidak cukup

Lebih daripada itu, temuan ini memperlihatkan bahwa dalam era globalisasi dan desentralisasi saat ini, masyarakat yang satu itu menjadi lebih nyata, bukan sekadar dibayangkan (apalagi hanya membayangkannya satu segi bahasa saja). Masyarakat itu menjadi nyata dalam pengamatan dan pengalaman hidup; tentang penderitaan dan kemakmuran yang samalah yang dapat menyatukan masyarakat.

Etnisitas dan nasionalitas orang Lamaholot merupakan dua atribut atau identitas yang dimiliki oleh orang Lamaholot selain atribut-atribut lain.

Mendieta (dalam Alcoff dan Mendieta 2003: 408) menyatakan

"Our identities...are a matter of positionality, or locality. An Identity is not a prius, object, or substratum, or essential substance. It is a social locus, and a social locus is an imagined and imaginary topos. This place or locality is a function of social topography, or how forces determine a field of forces. We move, or are in the process of moving, through those fields of forces. Social topographies themselves have changed in accordance with the stability and potentiality of some of the forces that constituted the web of forces determining the space of social interaction"

Identitas-identitas seseorang itu adalah persoalan posisionalitas atau lokalitas. Identitas tidak merupakan sesuatu yang ada di depan, suatu objek, atau tingkatan, atau suatu substansi yang esensial. Identitas merupakan suatu lokus sosial, dan bahwa lokus sosial itu sebenarnya adalah suatu peta yang terbayangkan, peta imajiner. Tempat atau lokalitas ini merupakan fungsi dari suatu topografi sosial, atau bagaimana kekuatan-kekuatan menentukan suatu medan kekuatan. Kita bergerak, atau ada dalam suatu proses bergerak, melalui medan-medan kekuatan itu. Topografi-topografi sosial itu sendiri telah berubah sejalan dengan perubahan stabilitas dan potensialitas, yang menentukan ruang interaksi sosial.

Menurut Mendieta (dalam Alcoff dan Mendieta 2003), dahulu negara-bangsa sebagai suatu maujud ekonomi politis muncul atau dibentuk sebagai interaksi identitas-identitas yang relatif stabil dan membentuk satuan-satuan geopolitis. Negara-negara bangsa itu berkembang melalui dan di dalam kancan proyek imperial dan kolonial, proyek yang diberikan sanksi dan dipersyaratkan/diminta oleh misi peradaban (*civilizational mission*).¹⁵ Proyek nasionalisme seperti ini telah membawa tidak hanya peperangan internal untuk unifikasi dan pasifikasi, tetapi juga perang imperial demi ekspansi peradaban itu sendiri. Dalam kacamata analisis sistem dunia, lanjutnya, pusat pengaturan sistem itu (*the managing center of the system*) berpindah dari satu bangsa ke bangsa lain bergantung pada bangsa (penjajah¹⁶) manakah yang sedang mengontrol sarana pokok ekonomi dunia dan militer

¹⁵ Ingat diskusi tentang nasionalisme versi Prancis di sebagian tanah jajahannya seperti di Afrika.

¹⁶ Kata dalam kurung ditambahkan sendiri oleh penulis.

Saat ini, dalam era globalisasi, proyek unifikasi dipertanyakan. Apakah perbedaan yang ada dalam negara-bangsa yang multi-etnik telah berhasil diseragamkan melalui proyek unifikasi seperti itu? Apakah proyek seperti itu berhasil menciptakan identitas tunggal yang terbayangkan (*a single imagined identity*)? Penelitian ini dan berbagai penelitian yang dikutip dalam disertasi ini sudah membuktikan bahwa proyek itu tidak berhasil, gagal. Etnisitas yang tertekan dan cenderung diabaikan oleh nasionalisasi pada waktu yang lalu kembali mendapatkan momentumnya yang tepat untuk revitalisasi pada era globalisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alcoff, Linda Martin and Eduardo Mendieta (eds). 2003. *Identities Race, Class, Gender, and Nationality*. Melbourne: Blackwell Publishing.
- Anderson, Benedict R.O'G 1990. *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Matabangsa.
- _____. 2001a. *Komunitas-Komunitas Terbayang*. (Terjemahan dari *Imagined Communities*). Yogyakarta: Insist & Pustaka Pelajar.
- _____. 2001b. "Western Nationalism And Eastern Nationalism; Is there a differences that matters?" dalam *New Left Review* 9 May Jun 2001. pp3142. <http://www.newleftreview.net/NLR24302.Shtml>.
- Barnes, R.H.1993. "Lamaholot", dalam Paul Hockings (ed).1993. *Encyclopedia of World Cultures* Vol.V.,East and Southeast Asia.
- _____. 2004a. "Keragaman dan Persatuan Masyarakat di Witihama, Adonara", dalam *Antropologi Indonesia* 74, 2004.
- _____. 2004b. "Community Diversity and Unity in Witihama, Adonara", dalam *Antropologi Indonesia* Special Volume, 2004.
- Bourdieu, Pierre. 1977. *Outline of A Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- _____. 1992. *Language and Symbolic Power*. Translated by Gino Raymond and Matthew Adamson, Edited and Introduced by John B. Thompson. Cambridge: Polity Press.
- Budiman, Manneke. 1999. "Jatidiri Budaya dalam Proses "Nation-Building di Indonesia Mengubah Kendala Menjadi Aset" dalam *WACANA*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya Vol. 1 No.1, 1999. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Chomsky, N. 1979. *Language and Responsibility*. London: Harvester.
- Coulmas, Florian. (Ed.) 1998. *The Handbook of Sociolinguistics*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Davies, Alan dan Catherine Elder. (Eds.). 2004. *The Handbook of Applied Linguistics*. Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd. Ethnic Studies Report, Vol. XV. No.2.

July 1997.

- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. 2000. *Handbook of Qualitative Research*. 2nd Edition. London: Sage Publications, Inc.
- Dhakidae, Daniel. 2001. "Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa sebagai Komunitas-komunitas Terbayang". Dalam Benedict Anderson. 2001. *Imagined Communities, Komunitas-komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist.
- _____. 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djohan, Djohermansyah. 2002. "Fenomena Etnosentrisme dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah", dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan Masyarakat dan Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Edisi No.16. Tahun 2002. Hal .53-71.
- Dorian, N. 1998. "Western language ideologies and small language prospects", Dalam L. Grenoble and L. Whaley (eds.). *Endangered Language: Language Loss And Community Response* (pp. 3-21). Cambridge: Cambridge University Press.
- Edwards, John. 1985. *Language, Society and Identity*. New York: Basil Blackwell Inc.
- Foley, William A. 1997. *Anthropological Linguistics: An Introduction*. Oxford: Blackwell Publishers Inc.
- Gadellii, K.E. 1999. *Language Planning: Theory And Practice, Evaluation of Language lanning Cases Worldwide*. Paris: United nations Educational Scientific and Cultural Orgaanization.
- Gal.S. 1998. "Multiplicity and Contention Among Language Ideologies" dalam B.B. Schieffell, K.A. Woolard, & P.V. Kroskirty (Eds.). *Language Ideologies: Practice and Theory*. (pp.445-9). New York and Oxford: Oxford University Press.
- Geertz, Clifford. 1996. *Welt in Stuecken. Kultur und Politik am Ende des 20 Jahrhunderts*, Passagen-Verlag, Wien.
- Gellner, E. 1983. *Nation and Nationalism: New Perspectives on the Past*. Oxford: Basil Blackwell.
- Giddens, Anthony. 2001. *Sociology*. 4th Edition. Cambridge, UK: Polity Press.
- Giles, H. and Powesland, P. 1975. *Speech Style and Social Evaluation*. London: Academic Press.
- Groeneboer, Kees. 1993. "Politik Bahasa pada Masa Hindia Belanda". dalam *WACANA Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya* Vol.1 No.1,1999. Hal. 32-48. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Halim, Amran. 1984. *Politik Bahasa Nasional 1*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Haryatmoko, J. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hawkesworth, M. E. and Maurice Kogan. 1992. *Encyclopedia of Government and Politics*. Volume 1,2. New York: Routledge, Chapman and Hall. Inc.
- Hefner, Robert W. (Ed). 2007. *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. Yoktakarta: Penerbit Impulse-Kanisius.
- James, Paul. 1996. *Nation Formation Towards a Theory of Abstract Community*.

- London: Sage Publications.
- Johnson, Nancy Kwang. 2001. "Senegalese "into Frenchmen"? The Politics of Language, Culture, And Assimilation (1891-1960)". Disertasi Ph.D. Faculty of Graduate School, Cornell University.
- Joseph, J.E. 2003. *Language and Identity: National, Cultural, Personal*. Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan
- Kawamoto, Kevin. J.1993."Hegemony and Language Politics in Hawaii" WA. World Englishes. Volume 12 Issue 2 Page 193-2007, July 1993.
- Keraf, Gorys.1978. *Morfologi Bahasa Lamalera*. Ende: Percetakan Nusa Indah.
- Konig, Matthias. 1999. "Cultural diversity and language policy". dalam *UNESCO* 1999. ISSJ 155/1999. pp. 401-408. Oxford: Blackwell Publishers.
- Kymlicka, Will. 2003. *Kewargaan Multikultural Teori Liberal mengenai Hak-hak Minoritas*. Terjemahan. (*Multicultural citizenship: a liberal theory of minority right*) . Jakarta: Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Laponce, J. A. 1992. Language and Politics dalam Hawkesworth, M. E and Maurice Kogan. *Encyclopedia of Government and Politics*. Volume 1, New York: Routledge, Chapman and Hall. Inc.
- _____. 2004."Minority Languages and Globalization". University of British Columbia. Internet.
- May, Stephen. 2001. *Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language*. Edinburg: Perason Education Limited.
- Moeliono, Anton. M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- O'Reilly, Camille. 2001."The Politics of Language and Ethnicity" dalam *The Global Review of Ethnopolitics*, Vol.1. no.2, December 2001, 67-73.Internet.
- Orwell, G. 1946. "*Politics and the English Language*", *Horizon*,13 (April), 252-65.
- Parekh, Bhiku. 1991."British Citizenship and Cultural Difference". dalam Geoff Andrews, (ed)., *Citizenship*, hlm. 183-204. London: Lawrence and Wishart.
- Roshwald, Aviel. 2001. *Ethnic Nationalism and the Fall of Empires Central Europe, Russia and the Middle East, 1914 – 1923*. New York: Routledge.
- Ruiz, Richard. 1984. "Orientation in Language Planning" dalam *NABE Journal* 8(2): 15-34.
- Scionti, Theresa Louise. 2001. "Language, Politics And The Hapulaar'en of Mauritania". Disertasi Doktor dari Graduate College of The University of Arizona.
- Schmid, Carol L. 2001. *The Politics of Language: Conflict, Identity and Cultural Pluralisme in Comparative Perspective*. Oxford University Press.
- Schimdt, Jorge R. 2000. "The Politics of Educational Language Policies Language Entreperneurs Interests and Institutions". Ph.D. Dissertation Graduate Program in Political Science, The State University of New Jersey.
- Schmidt, Ronald, Sr. 2007. "*Language Policy and Identity Politics in the United*

- States*". Internet: [http://www.temple.edu/tempress/titles/1505 reg.htm](http://www.temple.edu/tempress/titles/1505_reg.htm).
- Scionti, Theresa Louise. 2001. "Language, Politics and The Halpulaar'en of Mauritania". Ph.D. Dissertation. The University of Arizona.
- Smith, Anthony D. 1986. *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford: Blackwell.
- Shih C-Y. 2007. "Assimilation through Ethnicity: China's Ethnic Language Policy in Yunnan and Shenyang", *International Journal on Minority and Group Rights*, Volume 7, Number 3, 2000, pp.189-206 (18). Internet Website ©2007 Ingenta: Martinus Nijhoff Publishers.
- Shiraishi, Saya Sasaki. 1997. *Pahlawan-Pahlawan Belia Keluarga Indonesia dalam Politik*. Terjemahan. (*The Indonesian Family in Politics*). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Silverstein, M. 2000. "Whorfianism and the Linguistic Imagination of Nationality" dalam P.V. Kroskrity (Ed.). *Regimes of Language: Ideologies, Politics, and Identities* (pp. 85-138). Santa Fe, N.: School of American Research Press.
- Suryadi, Linus AG. 1995. *Dari Pujangga ke Penulis Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2002. "Migrasi dan Konflik Etnis: Belajar dari Konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah" dalam *Analisis CSIS Tahun XXXI/2002 No.3*. hal.340-352. *Konflik Sosial di Indonesia: Analisis Faktor Penyebab Struktural dan Kultural*.
- Uran, L.Lame. tt. *Sejarah Perkembangan Misi Flores Dioses Agung Ende*. Ende: Penerbit Nusa Indah.
- Vatter, Ernst. 1932. *Ata Kiwan*. Edisi bahasa Indonesia. Ende Flores: Penerbit Nusa Indah.
- Voloshinov, V. N. 1973. *Marxism and the Philosophy of Language*. (trans. L. Matejka & I.R. Titunik). Cambridge, MA & London: Havard University Press. (Original Work Published 1929).